

Analisis Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Royda¹ dan Dwi Riana²

¹⁻² Jurusan Manajemen, Universitas Tridianti Palembang

Email: royda@univ-tridianti.ac.id

Email: dwi.riana@sbm-itb.ac.id

Abstract

Fiscal decentralization aims to improve regional finance independency and reduce the fiscal dependency of central government. However, in practice, there are still many areas that rely on the assistance central finance for their regional development. The purpose of this study was to determine the level of development of local independence and financial ability as well as effects on economic growth in regency and city in the Sumatera selatan Province year 2008-2018. this research takes place in regency and city in the sumatera selatan province. While the data used in this research is financial data and economic growth 2008-2018 in the sumatera selatan province.

Methods of data analysis in this study there are two kinds, the first is the ratio of local independence and the ratio of local financial ability. Secondly, to investigate the influence of independent variables on the dependent variable used multiple linear regression analysis tool. According to analysis result have been obtained as follows. The ratio of local financial independence of regions indicated by the ratio of the average rate so low, still be between 0%-25%. According the ratio of local financial ability of regions averages between 0%-10% which is low. Local self-reliance has positive and significant on economic growth. Regional financial capability have positive but not significant effect on economic growth in regency and city in the sumatera selatan province.

Key word: local goverment, local finance, local independence

Abstrak

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, namun pada pelaksanaannya masih banyak daerah yang bergantung pada bantuan dana pusat untuk pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat perkembangan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi sumatera selatan dari tahun 2008-2018. Penelitian ini dilakukan di 15 kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah APBD dan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008-2018.

Metode analisis data pada penelitian ini ada dua macam, yang pertama adalah analisis rasio kemandirian dan kemampuan keuangan daerah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan alat regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata sangat rendah masih disekitar 0%-25%, sedangkan untuk rasio kemandirian keuangan daerah juga tergolong masih kurang yaitu rata-rata berada di antara 0%-10%. Kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomis sedangkan kemampuan keuangan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Keuangan Daerah, Kemandirian Daerah

Pendahuluan

Berkaitan dengan hakikat otonomi daerah, yakni berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besaran belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisis terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Untuk melihat kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Menurut Musgrave & Musgrave, 1980 (dalam Sumarsono, 2009:14) beberapa variabel yang menunjukkan hal tersebut antara lain : kebutuhan fiskal (*fiscal need*), kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), upaya fiskal (*fiscal effort*), derajat desentralisasi fiskal, serta koefisien elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB).

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Berikut gambaran Pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Tabel 1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan
Tahun 2010 - 2017

Kabupaten/ Kota di Sumsel	PAD Kabupaten/Kota di Sumsel (dalam juta rupiah)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Musi Rawas	20.000	30.040	35.455	53.223	60.000	72.506	76.131	90.319
Kota Lubuk Linggau	12.202	15.515	22.071	25.378	28.830	30.135	35.019	37.860
Kab. Musi Banyuasin	13.285	34.574	19.512	32.570	39.773	53.749	88.207	105.766
Kab. Banyuasin	10.024	12.197	15.194	20.005	20.005	28.376	31.189	39.342
Kota Palembang	103.261	113.596	155.457	196.108	224.461	263.010	458.534	509.788
Kab. Ogan Ilir	10.049	12.629	16.033	15.252	25.867	16.102	30.134	63.895
Kab. Ogan Komering Ilir (OKI)	13.777	11.888	25.178	30.606	30.051	37.479	41.061	54.165
Kab. Ogan Komering Ulu (OKU)	12.948	21.064	28.793	37.413	38.598	39.866	42.913	42.869
Kab. OKU Timur	2.681	9.555	9.587	11.087	31.717	26.487	23.041	30.864
Kab. OKU Selatan	1.395	2.922	5.509	4.555	6.594	13.113	13.207	13.444
Kota Prabumulih	9.250	12.093	15.009	16.826	21.146	24.009	26.887	33.864
Kab. Muara Enim	27.044	38.020	48.255	58.121	70.908	62.161	82.716	101.100
Kab. Lahat	18.280	20.474	26.500	40.500	35.151	51.733	76.525	62.156
Kab. Empat Lawang	-	-	7.154	6.089	10.060	10.905	14.603	16.603

Kota Pagar Alam	4.182	4.683	6.277	10.000	12.502	18.957	25.966	26.170
Total PAD	245.093	339.250	435.984	557.633	1.496.643	1.563.704	1.899.650	2.287.016

Sumber : Data diolah

Dari Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat perkembangan PAD Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2010-2017, dimana selalu terjadi peningkatan PAD setiap tahunnya untuk Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi cukup fluktuatif untuk Kabupaten Musi Banyu Asin, Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim, Lahat dan Empat Lawang.

Pembangunan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga peningkatan pembangunan ini akan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Untuk dapat memenuhi pengeluaran pemerintah, kabupaten/kota tersebut harus dapat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak bisa hanya dengan mengandalkan dana perimbangan dari pusat. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Pelaksanaan pembangunan menghadapi beberapa kendala, diantaranya perbedaan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya alam dan sumber dana pembangunan akan memperbesar ketimpangan tingkat kemandirian keuangan daerah antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Kabupaten/kota yang memiliki sumber dana pembangunan yang tinggi dapat membiayai sebagian besar pengeluaran pemerintah daerahnya, sementara Kabupaten/Kota yang memiliki sumber dana yang rendah memiliki ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.

Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan secara parsial?
- Bagaimana pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan secara parsial?
- Bagaimana pengaruh kemandirian dan kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan secara simultan?

Landasan Teori

Otonomi dan Desentralisasi

Otonomi daerah menurut UU.No. 32 Tahun 2004 adalah hak masyarakat daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, serta mengembangkan potensi dan sumber daya daerah. Penyelenggaraan otonomi dimaksudkan agar dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka sistem yang dianut daerah adalah sistem desentralisasi.

Menurut UU. No. 32 Tahun 2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Agar daerah otonom tersebut mampu mengatur dan mengurus rumah tangga yang telah diserahkan, maka daerah harus memiliki bermacam-macam kemampuan antara lain keuangan, aparatur, ekonomi dan lain sebagainya.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengambil keputusan dan pengelolaan fiskal kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang tersebut selanjutnya dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat yang bersangkutan (Boex, 2001: 13). Desentralisasi fiskal terdiri dari empat pilar (Boex, 2001: 14), yaitu:

- a. Pengeluaran, mengatur mengenai fungsi dan tanggung jawab pengeluaran untuk masing-masing tingkat pemerintahan,
- b. Pendapatan, berkenaan dengan sumber-sumber penerimaan objek pajak atau non pajak yang menjadi wewenang pemerintah daerah,
- c. Transfer, berkenaan dengan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, dan
- d. Pembiayaan, sebagai penyeimbang antara pendapatan dan pengeluaran daerah.

Desentralisasi Fiskal Daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran apa yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal dengan berbagai proxy, menurut Abdul Halim, (2007 : 144) sebagai berikut:

- a.
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$
- b.
$$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah (BHPBP)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$
- c.
$$\frac{\text{Sumbangan Daerah (SB)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

Kemandirian Keuangan Daerah

Desentralisasi Fiskal bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, juga untuk menciptakan sistem pembiayaan yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, serta untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah (Riyanto dan Siregar, 2005: 15). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007: 128).

Kemandirian keuangan daerah ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Tabel 2

**Pola Hubungan Tingkat Kemandirian
Dan Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	RasioKemandirian	Pola Hubungan
--------------------	------------------	---------------

Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber : Dwiranda, 2007 : 7

Kemampuan Keuangan Daerah

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber : Anita Wulandari (2001: 22)

Pertumbuhan Ekonomi

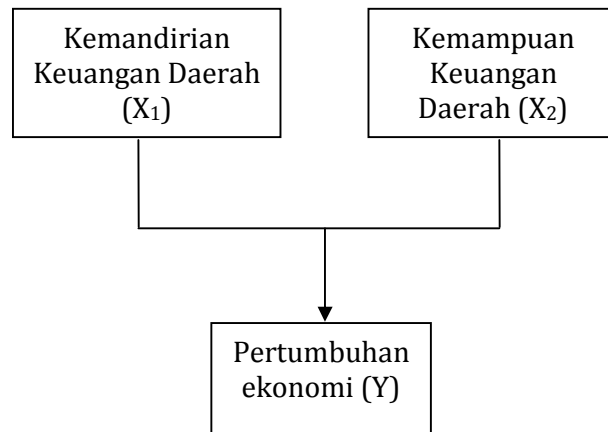
Dalam pembangunan ekonomi daerah terdapat suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan pertumbuhan angka-angka pendapatan nasional atau Produk Domestik Bruto. Ukuran ini lebih relevan digunakan karena batas wilayah pengukurannya yang memungkinkan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan tersebut dapat dinilai efektifitasnya. Selanjutnya yang lebih relevan untuk digunakan adalah nilai PDB berdasar harga konstan daripada PDB atas dasar harga berlaku.

Untuk membangun suatu pengukuran perubahan kuantitas output (dan bukan perubahan harga output), yang disebut GDP riil. Pengukuran output ini dalam harga konstan atau nilai mata uang yang konstan dari tahun dasar (Froyen, 2009: 33).

Kerangka Penelitian

Kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan melalui diagram berikut ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

- Variabel Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan
- Variabel Kemampuan keuangan Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan
- Kemampuan dan kemandirian keuangan daerah diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera.

Metode Penelitian**Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi Penelitian ini dilakukan di 15 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian inferensial melakukan analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Dengan demikian, kesimpulan penelitian jauh melebihi sajian data kuantitatif saja, dan kesimpulannya adakalanya bersifat umum.

Jenis Data

Data yang digunakan adalah data panel, yaitu gabungan dari *time series* dan *cross section* selama 11 tahun yaitu dari tahun 2008 sampai dengan 2018 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana alokasi Umum, Belanja Daerah, Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan dan PDRB Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan. Selain itu digunakan data sekunder lainnya seperti pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data**Analisis Kualitatif**

Analisis kualitatif adalah analisa yang berdasarkan data dan dinyatakan dalam bentuk uraian. Data ini merupakan data yang berupa informasi uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan atau menguatkan suatu gambaran yang telah ada.

Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (jumlah dan angka). Pendekatan ini berawal dari data yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- Untuk mengukur Kemampuan keuangan daerah digunakan Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

$$DOFi = \frac{PADi}{TPDi} \times 100\% \quad \dots \dots \dots (6.1)$$

Dimana : DOF : Derajat Otonomi Fiskal
 PAD : Pendapatan Asli Daerah
 TPD : Total Penerimaan Daerah
 i : Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan

- Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah digunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

$$RKKD = \frac{PAD}{Dana \text{ Perimbangan}} \times 100\% \quad \dots \dots \dots (6.2)$$

Dimana : RKKD : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
 PAD : Pendapatan Asli Daerah
 i : Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan

- Untuk mengukur tingkat pertumbuhanekonomi (r_t) digunakan rumus berikut :

$$rit = \frac{PDRBit - PDRBit-1}{PDRBit-1} \times 100\% \quad \dots \dots \dots (6.3)$$

Dimana : r : Pertumbuhan ekonomi
 PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
 i : Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan
 t : Tahun t
 t-1 : Tahun t - 1

- Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di gunakan rumus di bawah ini :

$$Ei = \frac{\Delta RKKDi}{\Delta rit} \times \frac{rit}{RKKDi} \quad \dots \dots \dots (6.4)$$

Dimana :
 RKKD : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
 r : Pertumbuhan Ekonomi
 Δ : Perubahan
 i : Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan
 t : Tahun t

- Untuk mengetahui besarnya pengaruh kemandirian dan kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan, digunakan model regresi berganda.

$$Y_{1t} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e_{1t}$$

Dimana : Y_{1t} : Pertumbuhan Ekonomi
 X_1 : Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD)
 X_2 : Derajat otonomi fiskal (DOF)
 e_{1t} : Variabel pengganggu yang tidak diamsukkan dalam model

t : Tahun t
 a, b_1, b_2, b_3 : Konstanta

Hasil Analisis dan Pembahasan Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah pada kabupaten dan kota provinsi sumatera selatan dilakukan dengan melihat rasio kemandirian keuangan daerah.

Tabel 4
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota Pro. Sumatera Selatan

Nama Daerah	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prov. Sumatera Selatan	64,32	78,08	94,99	84,07	86,15	86,47	64,62	85,36	100,74	58,28	113,83
Kab. Lahat	4,71	5,92	5,35	7,12	8,98	6,20	7,40	8,43	7,54	10,27	9,39
Kab. Musi Banyuasin	1,50	2,95	3,15	3,12	4,50	4,31	3,93	10,01	8,83	8,91	9,89
Kab. Musi Rawas	4,46	6,44	6,11	7,14	7,23	6,90	9,27	9,20	7,36	9,83	9,49
Kab. Muara Enim	6,92	6,75	8,74	6,45	7,37	7,74	9,50	10,11	9,11	8,77	11,29
Kab. Ogan Komering Ilir	3,60	3,90	4,09	4,17	4,04	4,52	4,99	10,68	20,51	20,01	22,52
Kab. Ogan Komering Ulu	5,27	7,19	7,91	6,78	6,08	5,27	8,00	12,25	11,00	8,57	17,52
Kota Palembang	16,87	20,69	23,51	24,39	39,12	34,58	43,46	51,57	48,41	45,96	52,89
Kota Prabumulih	4,29	4,50	5,44	5,45	5,56	6,02	8,09	10,96	10,86	14,31	16,21
Kota Pagar Alam	1,82	2,98	3,61	4,55	5,96	5,22	5,84	6,13	7,07	8,12	8,73
Kota Lubuk Linggau	6,80	7,55	8,67	6,76	7,29	7,08	7,44	9,21	11,48	12,05	15,82
Kab. Banyuasin	2,34	2,76	2,78	3,43	3,20	3,24	4,98	7,39	6,70	7,57	7,77
Kab. Ogan Ilir	2,77	2,40	4,20	2,52	4,19	7,79	9,14	5,29	19,21	26,53	19,60
Kab. OKU Timur	1,68	1,81	5,22	3,99	3,15	3,49	3,84	5,62	4,36	5,59	6,10
Kab. OKU Selatan	1,42	1,16	1,62	2,62	2,37	2,04	2,80	5,05	4,69	5,03	4,71
Kab. Empat lawang	5,36	1,80	2,68	2,26	3,17	2,94	3,07	3,35	4,37	5,10	5,74

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel rasio diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah selama 11 tahun pada kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan rata-rata masih dalam kategori rendah sekali (RS) dengan pola hubungan instruktif. Akan tetapi untuk provinsi sumatera selatan secara keseluruhan masuk pada kategori Tinggi dengan pola hubungan Delegatif. Untuk kabupaten/kotanya sendiri masih sangat rendah kecuali satu kota yang masuk kategori rendah dan sedang yaitu kota palembang. Hampir keseluruhan Kabupaten dan kota yang masuk kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif artinya kemandirian keuangan daerah di masing-masing kabupaten dan kota sumatera selatan masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat.

Menurut uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah untuk kabupaten dan kota di provinsi sumatera selatan selama 11 tahun terakhir masih sangat kurang, karena masih dalam skala interval 0% – 25% dan ini berarti dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah dan dasar pengenaan biaya. Pendapatan asli daerah masih belum dapat diandalkan karena daerah

masih belum mengoptimalkan sumber-sumber pendapat daerahnya, juga karena masih rendahnya basis pajak/retribusi pada masing-masing daerah.

Analisis Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Untuk mengukur tinggi rendahnya kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada derajat desentralisasi fiskal masing-masing daerah. Nilai rasio-rasionya ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5
Rasio Keuangan Daerah
Kab/Kota Prov. Sumatera Selatan

Nama daerah	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prov. Sumatera Selatan	39,01	43,69	47,79	45,52	38,46	39,65	34,78	38,71	38,84	36,80	52,55
Kab. Lahat	4,35	5,11	4,49	6,00	7,39	5,17	5,86	6,50	5,36	7,72	7,00
Kab. Musi Banyuasin	1,42	2,72	2,91	2,91	4,16	3,96	3,66	8,38	7,67	7,46	7,87
Kab. Musi Rawas	4,08	5,42	5,60	6,11	6,30	6,00	7,55	7,40	6,21	7,92	7,18
Kab. Muara Enim	6,29	5,78	7,60	5,40	6,26	6,52	7,72	8,18	7,11	7,23	8,31
Kab. Ogan Komering Ilir	3,32	3,53	3,67	3,54	3,40	3,72	4,17	8,66	14,66	14,37	15,97
Kab. Ogan Komering Ulu	4,82	6,39	6,57	5,70	5,30	4,30	6,47	9,31	8,16	7,04	12,17
Kota Palembang	13,03	15,23	16,98	15,52	22,98	20,13	23,24	25,65	26,05	28,35	28,97
Kota Prabumulih	3,82	4,07	4,85	4,64	4,87	5,26	6,64	8,83	9,21	11,62	13,04
Kota Pagar Alam	1,74	2,79	3,26	4,06	5,12	4,52	5,07	5,15	5,72	7,07	7,60
Kota Lubuk Linggau	6,11	6,46	6,83	5,29	6,38	5,85	5,49	6,78	8,21	10,23	12,06
Kab. Banyuasin	2,08	2,38	2,43	2,74	2,66	2,62	3,96	5,86	4,94	5,83	5,68
Kab. Ogan Ilir	2,51	2,26	3,75	2,15	3,67	6,27	7,47	4,24	12,66	17,80	13,14
Kab. OKU Timur	1,52	1,55	4,46	3,29	2,78	3,00	3,15	4,30	3,43	4,12	4,43
Kab. OKU Selatan	1,31	1,03	1,41	2,19	2,20	1,82	2,49	4,21	3,42	3,82	3,42
Kab. Empat lawang	4,60	1,70	2,49	2,04	2,82	2,60	2,72	2,90	3,65	4,11	4,42

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel rasio kemampuan keuangan daerah diatas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio masing-masing daerah meningkat tiap tahunnya walaupun masih dalam skala interval sangat kurang. Namun apabila dilihat hanya Provinsi Sumatera Selatan saja maka rata-rata intervalnya masuk ke skala baik. Ada beberapa Kabupaten dan Kota yang peningkatannya cukup baik untuk 3 tahun terakhir yaitu kota Palembang yang sudah masuk skala interval cukup baik, sedangkan daerah-daerah lainnya diantaranya Kabupaten OKI, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabumulih.

Melihat dari rasio yang ditampilkan diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih pada skala interval sangat kurang. Ini berarti bahwa pendapatan asli daerah mempunyai kemampuan yang masih sangat rendah dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih relatif sangat kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerahnya. Sehingga dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunannya masih sangat tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.

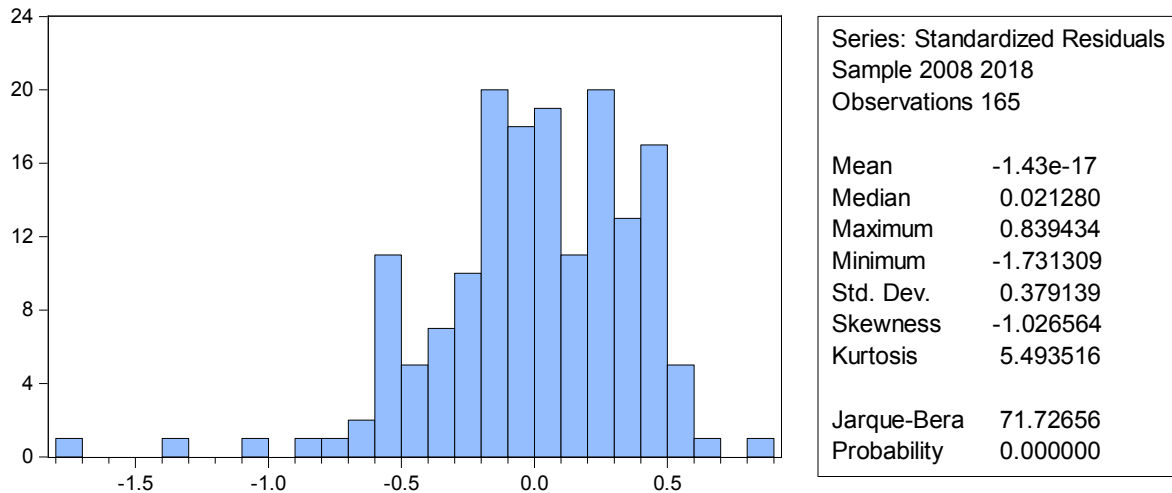
Berdasarkan uraian di atas, bahwa untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerahnya. Pemerintah harus mencari alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi

kekurangan pembiayaan untuk melaksanakan pemerintah dan program pembangunan yang berkelanjutan.

Deskripsi Statistik Kuantitatif

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 1

Salah satu asumsi dalam model regresi linier adalah distribusi probabilitas gangguan μ_i memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkolerasi dan mempunyai varian konstan. Uji normalitas bertujuan untuk melihat bahwa suatu data berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak, dilakukan uji jarque-bera.

Dari histogram, dapat dilihat bahwa nilai JB sebesar 71,72656 sedangkan nilai chi square yang dilihat dari jumlah variable independent $k=2$, maka $df = 165-2=163$ dengan alpha 5% yakni sebesar 193,791. Nilai $JB < Chi\ square$ menyimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6
Uji Multikolinearitas

	Y	X ₁	X ₂
Y	1.000000	0.737760	0.465756
X ₁	0.737760	1.000000	0.553605
X ₂	0.465756	0.553605	1.000000

Model yang baik adalah nilai R^2 tingginya tidak lebih tinggi dari 0,80. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi q korelasi antar variable independent.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 7
Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X ₁	0.395132	0.050573	7.813045	0.0000
X ₂	0.092774	0.096068	0.965716	0.3358
C	8.276687	1.035897	7.989871	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.652264	Mean dependent var		13.86061
Adjusted R-squared	0.614671	S.D. dependent var		0.642945
S.E. of regression	0.399107	Akaike info criterion		1.098154
Sum squared resid	23.57440	Schwarz criterion		1.418160
Log likelihood	-73.59769	Hannan-Quinn criter.		1.228056
F-statistic	17.35063	Durbin-Watson stat		1.614810
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat nilai R² sebesar 0,652264. Nilai chi square hitung diperoleh dari nilai R² dikali dengan nilai observasi yakni sebesar 0,652264 x 165 = 107,6236. Sedangkan nilai chi square table adalah 193,791. Dikarenakan nilai chi square hitung lebih kecil daripada chi square tabel, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Uji yang dikenal untuk mendeteksi autokolerasi adalah uji Durbin Watson (DW), Gujarati (2007:121). Adapun untuk melihat ada tidaknya autokolerasi dalam hasil regresi dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson statistiknya.

Dari table regresi pada metode fixed effect, nilai DW sebesar 1.614810. Jika nilainya mendekati angka 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, jika mendekati angka 0 atau 4, maka akan terjadi masalah autokorelasi (+/-).

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Uji Simultan (Uji F)

Hasil regresi dari pengarus kemandirian dan kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota provinsi sumatera selatan tahun 2008-2018 dengan menggunakan taraf keyakinan 95% ($\alpha = 5\%$), dengan $df = 165$, dapat dilihat berdasarkan uji F, nilai F statisti sebesar 17,3506 lebih besar dari nilai F kritis (F tabel) pada $\alpha = 5\%$, $df = 165$ yaitu sebesar 3,05. Artinya seleruh variabel bebas yaitu kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dalam model memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi pada tingkat keyakinan 95% atau bahkan 99%. Signifikasi kedua variabel bebas ditunjukkan juga oleh nilai F =

0,0000 < 0,05 (yakni nilai $\alpha = 5\%$) atau bahkan probabilitas $F = 0,0000 < 0,01$ (yakni nilai $\alpha = 1\%$).

Berdasarkan uji simultan tersebut dapat dijelaskan bahwa kedua variabel bebas yaitu kemandirian dan kemampuan keuangan daerah memiliki pengaruh yang kuat terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Berdasarkan output estimasi regresi data panel dengan metode FEM di atas, maka hasil estimasi tersebut dapat diringkaskan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 8
Nilai t-Statistik

Dependent Variable: Y					
Method: Panel Least Squares					
Date: 08/19/19 Time: 01:54					
Sample: 2008 2018					
Periods included: 11					
Cross-sections included: 15					
Total panel (balanced) observations: 165					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
X ₁	0.395132	0.050573	7.813045	0.0000	
X ₂	0.092774	0.096068	0.965716	0.3358	
C	8.276687	1.035897	7.989871	0.0000	
Effects Specification					
Cross-section fixed (dummy variables)					
R-squared	0.652264	Mean dependent var	13.86061		
Adjusted R-squared	0.614671	S.D. dependent var	0.642945		
S.E. of regression	0.399107	Akaike info criterion	1.098154		
Sum squared resid	23.57440	Schwarz criterion	1.418160		
Log likelihood	-73.59769	Hannan-Quinn criter.	1.228056		
F-statistic	17.35063	Durbin-Watson stat	1.614810		
Prob(F-statistic)	0.000000				

Dari tabel diatas maka persamaan regresi yang tercipta adalah:

$$Y_{it} = 8.2766 + 0.3951X_1 + 0.0927X_2$$

Nilai $t = \alpha$ semua variabel, ternyata lebih kecil dari t-hitung pada $\alpha = 5\%$ yaitu 1,6543, maka H_0 ditolak yang artinya semua variabel bebas pada penelitian ini berpengaruh terhadap variabel terikat.

Uji koefisien Determinan (Adjusted R²)

Hasil koefisien determinan pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen secara statistik dengan nilai

koefisien determinasi (R^2) = 0,6522, hal ini berarti bahwa 65 persen pertumbuhan ekonomi di 15 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dapat dijelaskan oleh variabel kemandirian dan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan 35 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model atau faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan

Pada regresi data panel menunjukkan bahwa variabel kemandirian keuangan daerah dalam jangka pendek signifikan (0,0000). Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian, dimana kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Halim (2008) mengemukakan bahwa Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Indikator kemandirian keuangan daerah ini diukur dengan menggunakan rasio pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan daerah. Mengetahui kemandirian keuangan daerah ini dapat menunjukkan seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Rasio kemandirian keuangan daerah ini apabila hasil semakin tinggi maka akan semakin kecil angka ketergantungan daerah terhadap pihak lain (pemerintah pusat khususnya) dan berlaku sebaliknya. Dengan melihat hubungan antara rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang dianalisis dengan regresi berganda dengan menggunakan alat analisis *evIEWS* maka dapat terlihat bahwa rasio salah satu pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat pula dipengaruhi oleh rasio kemandirian daerah, apabila daerah tersebut tingkat kemandiriannya tinggi maka akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonominya.

Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan

Pada regresi data panel menunjukkan bahwa variabel kemandirian keuangan daerah dalam jangka pendek signifikan (0,3358). Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian, dimana kemampuan keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

Keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah. Hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa tidak signifikannya pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi ini mungkin disebabkan sedikit atau bahkan tidak terlalu terlihat hubungan antara tingkat kemampuan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Perubahan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi baik naik atau turunnya tidak terlalu dipengaruhi oleh tingkat rasio kemampuan keuangan daerah, mungkin ada faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah diantaranya seperti rasio kemandirian daerah.

Kesimpulan

Berikut ini beberapa kesimpulan dari hasil penelitian :

- a. Berdasarkan analisis rasio kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa bahwa rasio kemandirian keuangan daerah untuk kabupaten dan kota di provinsi sumatera selatan selama 11 tahun terakhir masih sangat kurang , karena masih dalam skala interval 0% – 25% dan untuk rasio kemampuan keuangan daerah juga masih di angka 0% 10%. Ini berarti dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah dan dasar pengenaan biaya. Pendapatan asli daerah masih belum dapat diandalkan karena daerah masih belum mengoptimalkan sumber-sumber pendapat daerahnya, juga karena masih rendahnya basis pajak/retribusi pada masing-masing daerah.
- b. Kemandirian keuangan daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, dimana nilai signifikansi Kemandirian keuangan daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi sebesar $0,00 > 0,05$.
- c. Kemampuan keuangan daerah (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi (Y) di kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dimana nilai signifikansi upah terhadap inflasi sebesar $0,335 > 0,05$.

Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang didapat dari hasil kesimpulan penelitian diantaranya :

1. Diharapkan kepada pemerintah agar pada pelaksanaan otonomi daerah , kontribusi kemandirian dan kemampuan keuangan daerah perlu diperhatikan dan ditingkatkan agar daerah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang akan menjadi sumber pendapatan asli daerah guna membantu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih tim peneliti ucapkan kepada Kementrian Ristekdikti yang telah memberikan dukungan moril dan bantuan Dana Penelitian untuk Penelitian Dosen Pemula (PDP) No. 108/SP2H/LT/DRPM/2019 Tanggal 11 Maret 2019 kepada tim peneliti.

Referensi

- Boex, J., R. Kampanje, and R. Mwadiwa. 2001. *Malawi Intergovernmental Fiscal Transfers Study*. Government of Malawi / UNCDF.
- Dwiranda, et.al, 2007. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. Bali
- FROYEN, R.T., 2009. *Macroeconomics: Theories and Policies*. (9e). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

Halim, & Theresia. (2007). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah* (Ed. 2). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Siregar, Riyanto. (2005). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi*. KURS, 1 (1).

Sumarsono, Sugeng. 2009. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur*. JESP. Vol,1 No.2. malang